

**NOTULA PERTEMUAN LANJUTAN**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG**  
**RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN**

Hari/ Tanggal : Rabu/ 23 April 2025  
Tempat : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara  
No. Undangan : 500.5.2/220/DISKP/IV/2025 (Lampiran 1)  
Agenda : Agenda tentatif dilampirkan (Lampiran 2)  
Jumlah peserta : 27 orang (20 orang hadir luring dan 7 orang daring) (Lampiran 3)  
Notulis : Rosida Idriss dan Prawira Atmaja Tampubolon

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan pembahasan Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian Penangkapan Perikanan Cumi yang Berkelanjutan di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara. Pertemuan dibuka oleh Ibu Jenny Masniari (Kepala Bidang Perikanan Tangkap) dan mengundang seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang bersinggungan dengan pantai timur Sumatera Utara untuk secara aktif berkontribusi dalam pembuatan rencana aksi ini. Rencana aksi ini penting untuk memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan cumi di pasar global, terutama untuk memenuhi pasar yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu diimplementasikan pengelolaan perikanan cumi yang berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya ikan.

Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Prawira Atmaja tentang *harvest strategy* dan *harvest control rule* dalam pengelolaan perikanan, Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (RAPPB) di Sumatera Utara, dan Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian penangkapan Cumi Berkelanjutan di Pantai Timur Sumatera/Perairan Belawan yang kemudian dilanjutkan pemaparan tentang update program perbaikan perikanan cumi Medan oleh Ibu Rosida Idriss (Lampiran 4). Dalam pemaparan ini, beberapa poin yang disampaikan adalah:

- KepMen KP tentang RPP WPP 571 seharusnya sudah ada peninjauan kembali setelah lima tahun sejak dikeluarkan, namun hingga saat ini belum ada KepMen KP yang menggantikan
- Mengingat lingkup yang relatif kecil, disarankan oleh Direktorat PSDI Jakarta untuk mengatur pengelolaannya dalam Rencana Aksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti perikanan pelagis kecil di Sulawesi Selatan
- Pengenalan tentang ecolabelling pada perikanan dan manfaatnya
- Salah satu ecolabelling adalah Marine Stewardship Council (MSC) yang menggunakan tiga *principles* sebagai acuannya, yang salah satunya adalah tata kelola perikanan yang baik, yang memiliki aturan dalam pelaksanaannya.
- Ajakan untuk menelusik ketersediaan data yang dimiliki oleh para kota/kabupaten di sekitar pantai timur Sumatera yang memiliki produksi cumi sebagai salah satu komoditas yang penting.
- Ajakan untuk mulai mengumpulkan data perikanan cumi dan bersedia untuk turut serta dilibatkan apabila membutuhkan bantuan dalam identifikasi sumber daya dan pengumpulan data produksi.
- Perlunya pembentukan Tim RAP3IB dengan SK dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.

- FIP Cumi berhasil mempertahankan fishery rating A (*advance*) dengan 75% indikator telah terlaksana yang merupakan hasil kerja sama dari seluruh *stakeholder* FIP Cumi Medan
- Klausul yang masih belum terlaksana berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang terkait dengan ketersediaan peraturan, *harvest strategy*, dan *harvest control rule*.
- Pelaporan ke Fishery progress yang berikutnya adalah bulan Agustus 2025 dan membutuhkan progress tentang keberadaan peraturan
- MSC Assecor Asesor akan melakukan Verification of Progress (VoP) audit di bulan Oktober 2025
- Berdasar pada BMT *tracker* terlihat ada 7 klausul yang masih berwarna merah dan kuning (belum sukses dilakukan) yang diharapkan sudah kuning pada pelaporan Agustus 2025 dan hijau pada February 2026.
- Ketujuh klausul ini terkait dengan peraturan dan strategi pengelolaan perikanan cumi yang sepenuhnya ada dalam kewenangan pemerintahan
- Apabila FIP Cumi Medan berhasil mendapatkan sertifikasi ecolabelling MSC, maka akan menjadi cumi pertama di Asia yang tersertifikasi MSC.
- Akhir jangka waktu FIP Cumi untuk mencapai full sertifikasi adalah Juni 2026

Bapak Fery Sutyanan dari Direktorat PSDI, KKP menanggapi paparan dengan menyampaikan bahwa PSDI selalu mengikuti progress dari FIP Cumi dan team FIP Cumi selalu memberikan *update* rutin ke PSDI pula. Ecolabelling ini memang perlu jika kita ingin meningkatkan pemasaran produk kita. Lebih lanjut, Pak Fery mengajak tim untuk berfokus kepada perairan Belawan saja yang memang sudah tersedia datanya. Juga berfokus pada poin-poin yang merah dan kuning dalam BMT yang disampaikan oleh Ibu Rosida. Pak Fery kembali mengingatkan bahwa MSC sebenarnya hanya memerlukan dokumen legal untuk manajemen pengelolaan perikanan dan tidak harus dikeluarkan oleh level menteri atau gubernur. Dokumen ini bisa dikeluarkan dengan SK dari Dinas KP Sumatera Utara sehingga sudah ada dokumen legal yang dapat ditunjukkan pada saat assessor MSC datang ke Indonesia sembari proses untuk Peraturan Gubernur tetap dilanjutkan. Legal dokumen yang dikeluarkan menggunakan SK Dinas tersebut dapat menggunakan *research* data yang sudah dikerjakan oleh tim FIP Cumi Medan selama ini. Pak Fery juga menambahkan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, kegiatan *review* RPP WPP 571 sepertinya belum dapat dilakukan di tahun ini. Perlu adanya pengkajian yang lebih detail untuk melakukan *review* RPP saat ini.

Ibu Mutiara Faramitha Tarigan juga turut menyampaikan masukan dalam pertemuan ini. Ibu Mutiara menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah lain di pantai timur Sumatera yang secara rutin melaporkan hasil tangkapan cuminya. Di masa mendatang, daerah-daerah ini dapat juga dilibatkan terkait pengelolaan perikanan cumi. Namun untuk saat ini, fokusnya memang hanya di daerah Medan dan perlu juga melibatkan dinas terkait di Kota Medan.

Pertemuan berjalan dengan baik dan lancar. Peserta-peserta yang hadir pada pertemuan secara aktif berdiskusi untuk menanggapi paparan yang disampaikan sebelumnya. Foto-foto kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5. Pertemuan ditutup pada pukul 11.35 WIB oleh Ibu Jenny Masniari. Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini berupa:

- Dokumen pengelolaan yang akan dibuat terlebih dahulu adalah pengelolaan perikanan cumi di perairan Belawan. Untuk pengelolaan cumi di perairan pantai timur Sumatera Utara akan dilakukan apabila data yang dibutuhkan sudah terkumpul.
- Untuk persiapan pelaporan FIP Cumi pada bulan Agustus 2025, sekaligus untuk persiapan kedatangan assessor MSC, akan dibuatkan dokumen legal berupa dokumen

pengelolaan perikanan cumi & strategi tata kelolanya dengan dokumen bertandatangan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terlebih dahulu.

- Dokumen yang akan dibuat menggunakan data riset dan data tangkapan Cumi dari Belawan untuk pembuatan *legal* maka sebaiknya memakai data tersebut saja untuk pembuatan legal dokumen manajemen pengelolaan perikanan cumi di perairan Belawan
- PerGub dan KepGub akan terus diproses untuk memperkuat legalisasi dokumen pengelolaan perikanan cumi & strategi tata kelolanya beserta kontrolnya.
- Prawira akan ke PSDI Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Fery untuk memberikan *progress update* dan meminta petunjuk detail terkait naskah yang diharapkan dapat dikeluarkan oleh SK Kepala DisKP ProvSU)
- Menyiapkan Team pembuatan RAP3IB - perlu dibentuk Tim RAP3IB dengan SK dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara

Lampiran 1. Surat undangan pertemuan *Harvest Strategy* dan *Harvest Control Rule* di Pantai Timur Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sei Batugingging No. 6, Medan, Kode Pos 20154  
Telepon (061) 4568819, Faksimile (061) 4153335  
Pos-el [program.dkpsu@yahoo.com](mailto:program.dkpsu@yahoo.com), Laman [dkp.sumutprov.go.id](http://dkp.sumutprov.go.id)

Medan, 14 April 2025

Nomor : 500.5.2/220/DISKP/IV/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 1 halaman  
Hal : Pembahasan *Harvest Strategy* dan *Harvest Control Rule* Perikanan Cumi di Pantai Timur Sumatera Utara

Yth. (Daftar Terlampir)  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap Nomor: B.128/DJPT.2/PI.120/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Pengelolaan Cumi-Cumi di Wilayah WPPNRI 571 dan untuk memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan cumi di pasar global, terutama untuk memenuhi pasar yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu diimplementasikan pengelolaan perikanan cumi yang berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya ikan berbasis ekosistem.

Untuk itu kami harapkan kehadiran Saudara dalam pembahasan rencana *harvest strategy* dan *harvest control rule* perikanan cumi di perairan pantai timur Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 23 April 2025

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Luring (*offline*)

Ruang Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu  
Jln. Sei Batugingging No. 6, Kel. Merdeka, Kec.  
Medan Baru, Kota Medan

Daring (*online*)

Melalui aplikasi zoom meeting dengan

Meeting ID : 811 367 6303 , Passcode : DISKP1

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



HAMDAN SUKRI SIREGAR, S. Sos, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c  
NIP. 197708262003121004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan
4. Peringgal

Lampiran I.

Nomor : 500.5.2/220/DISKP/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

Kepada Yth.

1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai
8. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batubara
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu
12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara
13. Direktur Utama PT. Toba Surimi Industries
14. Direktur Utama Happy Seafood Co.
15. Ketua Tim FIP Perikanan Cumi Medan
16. Kepala Stasiun KIPM Medan II
17. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Lampiran 2. Agenda tentatif pertemuan *Harvest Strategy* dan *Harvest Control Rule* di Pantai Timur Sumatera Utara

<b>WAKTU (WIB)</b>	<b>AGENDA</b>	<b>NARASUMBER</b>
09.00 – 09.05	Pembukaan	DiSKP
09.05 – 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	DiSKP
09.10 – 09.15	Pembacaan Doa	DiSKP
09.15 – 09.25	Kata sambutan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sekaligus membuka acara	Kepala DisKP Prov. Sumut
09.25 – 09.30	Foto Bersama	DiSKP
09.30– 09.45	<i>Harvest strategy</i> dan <i>harvest control rule</i> dalam pengelolaan perikanan	FIP Cumi Medan
09.45 – 10.00	Update program perbaikan perikanan cumi Medan	FIP Cumi Medan
10.00 – 10.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
10.30 – 10.45	Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (RAPPB) di Sumatera Utara	FIP Cumi Medan
10:45 – 11.00	Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian Penangkapan Cumi Berkelanjutan di (Pantai Timur Sumatera/ Perairan Belawan)	FIP Cumi Medan
11.00 – 11.30	Diskusi dan Tanya Jawab	
11:30 – 11.40	Kesimpulan dan penutup	Kepala DisKP Prov. Sumut

Lampiran 3. Daftar hadir pertemuan *Harvest Strategy* dan *Harvest Control Rule* di Pantai Timur Sumatera Utara

**Hadir luring**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Sei Batugingging No. 6 Telp.(061) 4568819 Fax. 415333 Website.dkp.sumutprov.go.id  
email.program.dkpsu@yahoo.com. Kode Pos : 20154 Medan

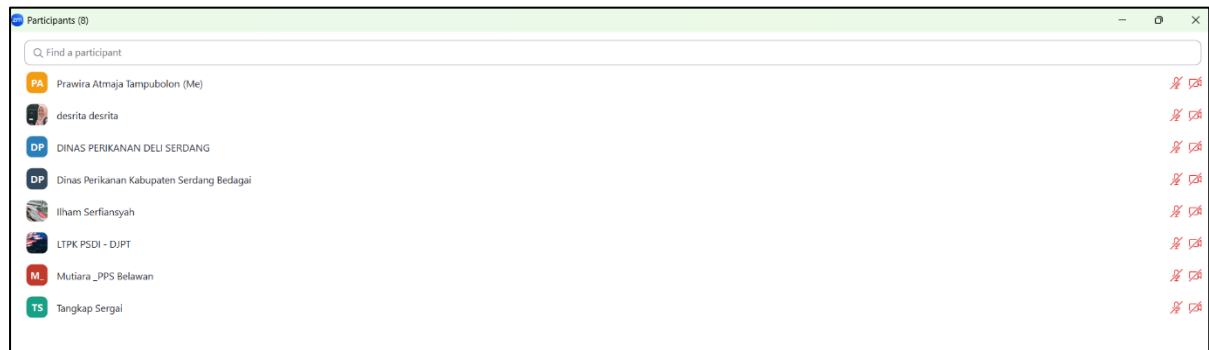
**DAFTAR HADIR**

**HARI** : RABU  
**TANGGAL** : 23 April 2025  
**WAKTU** : 09.00 WIB s.d selesai  
**TEMPAT** : RUANG DATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVSU  
**ACARA** : Pembahasan *Harvest Strategy* dan *Harvest Control Rule* Perikanan Cumi di Pantai Timur Sumatera Utara

NO	NAMA	OPDI/ ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Jenny Masurani		Kabid perikanan	
2	Herat Siregar	DISKOP	Tangkap P3F	
3	Hilga Nanda	DISKOP		
4	Fathur Rahman	DISKOP	Pelaksana	
5	Jenny Purba	DISKOP	Pelaksana	
6	Ramona Amara Tampubolon	BRIN	Peneliti	
7	Perdana Ginting	SK-IPM Medan II	Inspektur Mutu	
8	Tupa Prasasti Sitanggang	Sta. PSDKP Belawan	Pengawas perikanan	
9	Zulkarnaini Nasution	Sta. PSDKP Belawan	Pengawas perikanan	
10	Rosida	The Happy Sedojo	Direktur	
11	Samudra Jahayko	PT-TSI	DA	
12	Ari Utama	DISKOP		
13	Aslina Damanic	DISKOP	Perencana	
14	Putri Efendi	DISKOP	Tangkap	
15	Nurul Fadillah	DISKOP	Tangkap	
16	Mimi Siregar	DISKOP	Tangkap	
17	Eva Andriau	DISKOP	—	
18	Mauliyca	DISKOP	—	
19	Andi	—	—	
20	Fahmi	—	—	

## ***Hadir daring***

No	Nama	Instansi
1	Desrita	Universitas Sumatera Utara
2		Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang
3		Dinas Perikanan Kab. Serdang Bedagai
4	Ilham Serfiansyah	Direktorat PSDI, DJPT, KKP
5	Fery Sutyanan	Direktorat PSDI, DJPT, KKP
6	Mutiara Faramitha Tarigan	PPS Belawan, DJPT, KKP
7		Bagian Perikanan Tangkap, Kab. Serdang Bedagai



***Harvest Strategy dan Harvest Control Rule di Pantai Timur Sumatera Utara***

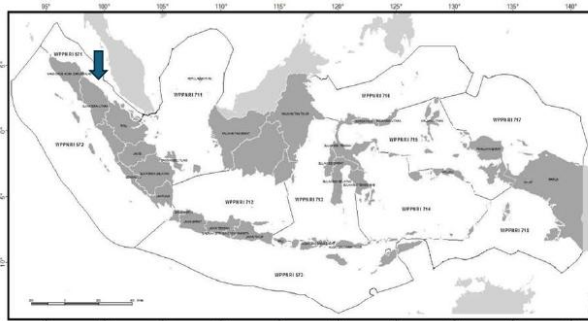
1

**OUTLINE**

- *Harvest Strategy dan Harvest Control Rule* dalam Pengelolaan Perikanan
- *Update Program Perbaikan Perikanan Cumi Medan*
- Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (RAPPB) di Sumatera Utara
- Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian Penangkapan Cumi Berkelanjutan di (Pantai Timur Sumatera/ Perairan Belawan)

2

## Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI



- RPP WPPNRI 571
- Kepmen KP No. 75/KEPMEN-KP/2016
- Jenis prioritas yang dikelola
  - Pelagis kecil
  - Udang
- Memerlukan peninjauan ulang pada tahun **2021**

3

## Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)

- **Permen KP No. 22 Tahun 2021**: RPP ditetapkan berdasarkan **WPPNRI** (Laut dan PD) dan/atau **jenis ikan** (rajungan, lemuru, ikan terbang, sidat, dsb)
- RPP adalah dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan
  - Tindakan Pengelolaan secara detil dituangkan ke dalam Dokumen *Harvest Strategi* yang memuat *Harvest Control Rules (HCR)*

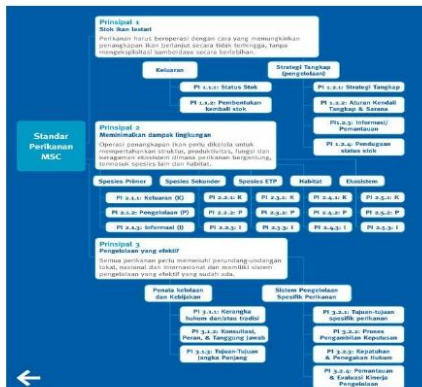
4

## Ecolabeling

- Ecolabel perikanan adalah **label** atau **tanda pengakuan** yang diberikan kepada produk-produk perikanan yang memenuhi standar lingkungan yang ketat;
- Mengkomunikasikan produk Perikanan yang telah berhasil menerapkan praktik Pengelolaan Perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab;
- Contoh sertifikasi ecolabeling perikanan
  - **MSC**, ASC, Global G.A.P. Aquaculture, Friend of the Sea, Best Aquaculture Practices, Fair Trade, dsb

5

## Marine Stewardship Council (MSC)



### Prinsip 1. Sustainable fish stocks (Stok SDI yang Berkelanjutan)

- Outcome/Hasil : Status stock dan Stock Rebuilding
- Harvest Strategy/Strategi Pemanfaatan : Harvest Control Rules & Tools, Information/Monitoring, Assessment of Stock Status

### Prinsip 2. Minimizing environmental impacts (Meminimalkan Dampak Lingkungan)

- Primary Species (Spesies tangkapan utama)
- Secondary Species (Spesies bukan tangkapan utama)
- ETP Species (Spesies yang terancam, hampir punah, dan dilindungi)
- Habitat dan Ekosistem

### Prinsip 3. Effective management (Pengelolaan yang efektif)

- Governance and Policy (Tata Kelola dan Kebijakan)
- Fishery Specific Management System (Sistem pengelolaan perikanan yang spesifik)

6

## Fisheries Improvement Program (FIP)

Program perbaikan perikanan

- Program yang menyatukan berbagai *stakeholder* Perikanan (dari nelayan kecil, nelayan skala industri, perusahaan, pengambil kebijakan, akademisi, NGO, dll) dalam suatu kolaborasi menuju penerapan praktik dan pengelolaan perikanan yang baik, benar dan bertanggung jawab, sehingga perikanan tersebut nantinya dapat mencapai sertifikasi MSC
- Tujuan utama dari FIP adalah untuk **menciptakan perubahan terukur, yang telah memenuhi standar MSC dan memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi suatu komoditas Perikanan**



7

## Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan

- Menteri/Pemerintah menetapkan: rencana pengelolaan perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, kewenangan untuk menyusun rencana pengelolaan menjadi kewenangan KKP (UU No 31/2004 Pasal 7(1a) dan PP No 27/ 2021 Pasal 41(1))
- Dalam implementasi RPP khususnya di tingkat masing-masing provinsi, KKP mendorong Provinsi untuk Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan di Tingkat Provinsi.
  - Beberapa contoh provinsi yang sudah menetapkan/Menyusun rencana aksinya antara lain: Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, NTB, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dll.
- Penyusunan Pengelolaan Perikanan di Tingkat Provinsi diharapkan dapat mengacu kepada peraturan-peraturan terkait yang telah disusun seperti Permen KP Nomor 22 Tahun 2021 (RPP dan LPP), Perdirjen PT No.17 Tahun 2017 tentang Juknis Penyusunan Harvest Strategy Perikanan, dan peraturan lainnya.

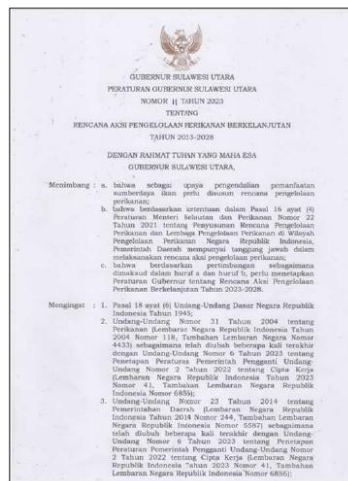
8

# Pengelolaan Perikanan Cumi di Perairan Belawan



Senin, 9 Desember 2024

9



10

## RANCANGAN PERGUB SU TENTANG RAPPB

- RAPPB : Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan



14 Januari 2025



25 Februari 2025

11

## RAPPB

*(Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan)*

### PASAL III

1. RAPPB ditetapkan berdasarkan unit pengelolaan wilayah kelola dan/atau jenis ikan sesuai kewenangan pemerintah daerah
2. Wilayah Kelola Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan
3. Jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) ikan pelagis kecil;
  - b) ikan demersal;
  - c) ikan karang;
  - d) cumi-cumi
  - e) rajungan;
  - f) lobster;
  - g) kepiting;
  - h) jenis ikan lain yang mempunyai nilai ekonomis penting;
  - i) jenis ikan yang dilindungi
  - j) jenis ikan endemik; dan/atau
  - k) jenis ikan yang terancam punah

12

## RAP3IB

*(Rencana Aksi Perlindungan dan Pengendalian Penangkapan Ikan Berkelanjutan)*

### PASAL IV

(1) Dalam melakukan pengelolaan perikanan disusun RAP3IB

(2) RAP3IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan dan pelestarian;
- c. riset dan inovasi;
- d. pengendalian penangkapan ikan;
- e. Kelembagaan
- f. pemantauan dan evaluasi

13

## Perikanan cumi di kabupaten/kota di pantai timur

- Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat
- Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang
- Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai
- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batubara
- Dinas Perikanan Kabupaten Asahan
- Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu
- Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara

14

## Tindak lanjut

- Pertemuan terkait *harvest strategy* dan *harvest control rule* dalam RAP3IB akan dilanjutkan setelah RAPBB dirilis
- Terkait Lokasi: Perairan pantai timur Sumut atau Perairan Belawan akan ditentukan dengan mempertimbangkan produksi cumi dan ketersediaan data di kabupaten/kota di sepanjang pantai timur Sumatera Utara
- Tim perancang RAP3IB cumi akan ditetapkan oleh DisKP



Presented by: Rosida Idriss (Co-Founder/Technical Director, The Happy Seafood Co.)

MSC-ITM Squid FIP Meeting  
Medan, North Sumatra Indonesia

23<sup>rd</sup> April 2025  
Medan Squid Fisheries



© 2025 The Happy Seafood Co. Private and confidential. Not for circulation or distribution.

## Agenda

- FIP progress to date.
- Co-ordinating the implementation program of PIT (Measured Fisheries) and the setting up of a 'quota system' for small-scale fisheries.
- Draft Squid FMP and HS&HCR (FAO Area 57.1 Eastern Indian Ocean).
- AOB

5. Sehubungan dengan hal tersebut kami menyarankan agar pengelolaan perikanan cumi di Belawan dilakukan melalui Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) atau Strategi Pemantauan (*Harvest Strategy*) Perikanan.

6. Adapun dokumen RAPP dan *Harvest Strategy* dapat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN WEDDAN MERDEKA, TUBU OKOR 19  
JAKARTA, 11110, INDONESIA, P.O. BOX 1130  
KEMENPERA, TELPON (021) 351 9070 (LACAK), FAKS (021) 3521782  
LAMARAN: [www.kkp.go.id](mailto:www.kkp.go.id) SURBEL: [www.kkp.go.id](mailto:www.kkp.go.id)

Nomor : B.128/DJPT.2/PI.120/II/2025 8 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengelolaan Perikanan Cumi - Cumi di WPPNRI 571

Yth. Sdr. Rosida Idris  
Co-Founder The Happy Seafood Co. – Pimpinan FIP Perikanan Cumi - Cumi  
di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudari perihal Surat Permohonan arahan tindak lanjut pembuatan dokumen pengelolaan perikanan cumi di Medan tertanggal 19 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 7 Ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa Menteri menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP).  
2. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 41 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 disebutkan bahwa "Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan/atau jenis ikan.  
3. Perikanan Cumi - Cumi di Belawan terletak di WPPNRI 571, menggunakan metode penangkapan tradisional dengan pancing ulur (*handline*) dan menggunakan kapal berukuran < 5 GT. Perikanan ini telah terdaftar dalam program MSC *Fish for Good* Indonesia sejak 2019, dan saat ini dalam proses transisi menuju sertifikasi MSC dengan dukungan pendanaan MSC OSF selama 2 tahun.  
4. Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan yang relatif kecil dan hanya di perairan Belawan, pembuatan dokumen pengelolaan perikanan cumi di Medan tidak memungkinkan untuk disusun menjadi dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang berlaku nasional dan ditetapkan oleh Menteri.



**Actions Progress** This shows the proportion of actions in the workplan that the FIP has completed.



**Actions Overview** This shows the proportion of actions that are behind schedule, on track, completed, or not yet started.

Category	Percentage
On Track	50%
Completed	50%
Behind	0%

**Red Indicator Progress** This shows the proportion of actions specifically addressing red indicators that are behind schedule, on track, completed, or not yet started. This helps users understand the progress the FIP is making on the biggest challenges in the fishery.

Category	Percentage
On Track	50%
Completed	50%
Behind	0%

**FIP Progress Rating**  
A - Advanced Progress

**FIP Objective(s)**

To achieve MSC certification by 2026.

- Principle 1: Develop and implement an acceptable Harvest Strategy with Control Rules relevant for the squid species.
- Principle 2: Collect data and other information available on the effects of the ecosystem structure, habitats, vulnerability and the role of the stock in the food web (e.g., key prey or predator species).
- Principle 3: Develop a Fisheries Management Strategy and Management Plan for the squid species that includes long and short-term well-defined objectives that are measurable.

**FIP Type**  
Comprehensive

**FIP Stage**

Stage 4: Improvements in Fishing Practices or Fishery Management

**Start and Projected End Dates**

February, 2021 -

Indonesia North Sumatra squid - headline

Overview

**FIP Description**

Recognising the need for sustainable fisheries (governance, economic and social development), the squid fishery enrolled onto the MSC Fish for Good Indonesia programme in 2019. The main purpose is to develop a Fisheries Management Plan for squid, working with the Indonesia Ministry of Marine Affairs and Fisheries Department (MMAF) for eventual roll-out to other squid fishing communities in Fisheries Management Area (FMA) 571.

The squid fishery is located in the Belawan area, Medan, in the North Sumatra province of Indonesia and is part of FMA 571.

Squid are caught traditionally by using handline with jigs on small registered vessels that fish 12-15 miles off the north-east coast of Medan (Unit of Certification). It is worth noting that no other gear type is used during fishing.

This FIP has now successfully entered the In-Transition to MSC (TM) program with a commitment to achieving MSC certification and full assessment after completing the TM period.

On the 20th of April 2021, the FIP was awarded the MSC OSF funding for 2 years. Full details of the global press release and award can be found on the following links:

<https://www.msc.org/media-centre/press-releases/press-release/marine-stewardship-council-funds-ocean-projects-to-drive-progress-in-sustainable-fishing>

<https://www.msc.org/what-we-are-doing/our-collective-impact/ocean-stewardship-fund/impact-projects/minimising-fishing-impacts-on-indonesian-squid-stocks-2021>

How is this FIP Doing?

Current Status:

**Phone**

444 (0) 7876-134302

**Website Name**

PT. Tobo Sarami Industries

© Fishery Progress. All Rights Reserved.

Source URL: <https://fisheryprogress.org/profile/indonesia/monthly-summits-quick-handline>

June, 2026

**Species**

**Common Name**

Mitre Squid

**Scientific Name**

Uroteuthis chinensis

**Gear Type**

Handline

**Location**

**FAO Major Fishing Area**

Area 57 (Indian Ocean, Eastern)

**Exclusive Economic Zones**

Indonesia

**Geographic Scope**

Belawan area, North Sumatra

**Estimated Total FIP Landings**

140 metric tons

**FIP Leads**

**Organization Name**

The Happy Seafood Co.

**Organization Type**

Industry

**Primary Contact**

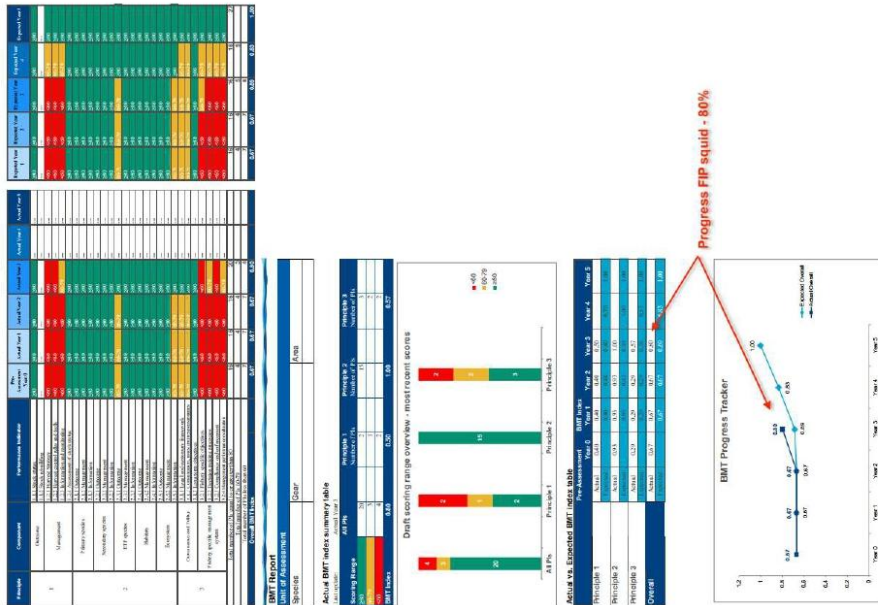
Rosita Kris

**Email**

[rosita@thehappyseafood.co](mailto:rosita@thehappyseafood.co)

## Squid FIP Progress (Year 4 Reporting – February 2025)

- FisheryProgress has now completed the review of the Annual Progress Report for February 2025 (48 Months) and is marked as complete – next reporting is due in August 2025 (54 months).
- Squid FIP progress rating is 'A' with **75% of MSC Performance Indicators** completed and **50% Actions** on Implementation Action Plan completed.
- Squid FIP is currently at stage '4' – Improvements in Fishing Practices or Fishery Management.
- The draft Fisheries Management Plan (FMP) and Harvest Strategy and Harvest Control Rule (HS&HCR) has now been released and in the public domain (currently in consultation phase 2).
- The Squid FIP has been in touch with bio.inspecta for the Annual Verification of Progress (VoP), which will be conducted on site in early October 2025 (bio.inspecta will advise if the Squid FIP is ready for a full assessment and if so, an Announcement Comment Draft Report (ACDR) will be produced, which is a new requirement as part of ITM V3.0.
- The outstanding actions on the Implementation Action Plan is A3 (FMP) and A4 (HS&HCR), which is wholly owned/managed by the Indonesian Government
- The Squid FIP target end date is June 2026.





## Stage 4 ( Increases to MSC PI information and management scores)

P1 – sustainable fish stocks	P2 - minimizing environmental impact	P3 - effective management
1.2.1. <b>merah</b>	2.1.2.	3.1.1. <b>sudah hijau</b>
1.2.2. <b>merah</b>	2.1.3.	3.1.2. <b>sudah hijau</b>
1.2.3. <b>sudah kuning</b>	2.2.2. <b>P2 - Semua klausul sudah hijau</b>	3.1.3. <b>sudah hijau</b>
1.2.4. <b>sudah hijau</b>	2.2.3.	3.2.1. <b>merah</b>
	2.3.3.	3.2.2. <b>sudah kuning</b>
	2.4.2.	3.2.3 <b>merah</b>
	2.4.3.	3.2.4. <b>sudah kuning</b>
	2.5.2.	
	2.5.3	

## Stage 5

### Clarification of existing guidelines:

- Clarify requirement to support increase in biomass and decrease in by catch - old data and assessments can be reanalyzed to produce a different result in favor of a score change and a Stage 5 result.
- The adjusted text specifies that only new data and new analysis would be considered in support of a Stage 5 result, in order to close any loopholes on old stock assessments.

### Clarification of existing guidelines:

- New text has been added in the second paragraph to highlight the fact that basic FIPs can refer to guidance on FisheryProgress.org, even though they are not reporting against all MSC PIs.

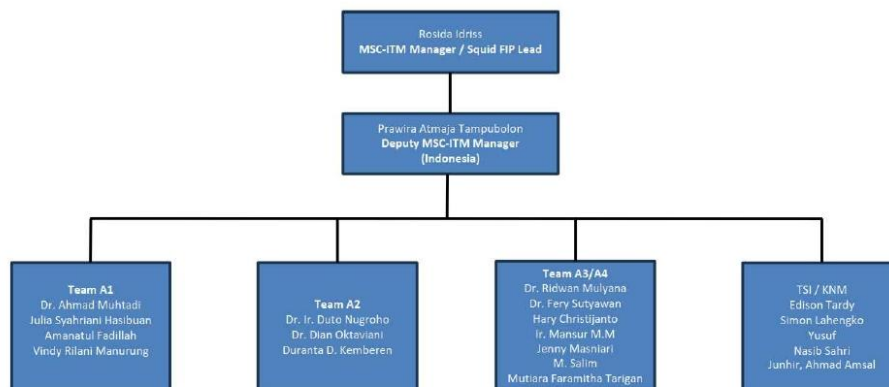
### Transparency in linking actions to improvements:

- New requirements have been added to link FIP tasks and actions (Stage 3) to FIP outcomes (Stage 5). Similar to the new requirements in Stage 4, this is intended to increase the link between the FIP results and FIP actions contributing to these.

## Stage 5 ( Increases to MSC PI *outcome* scores)

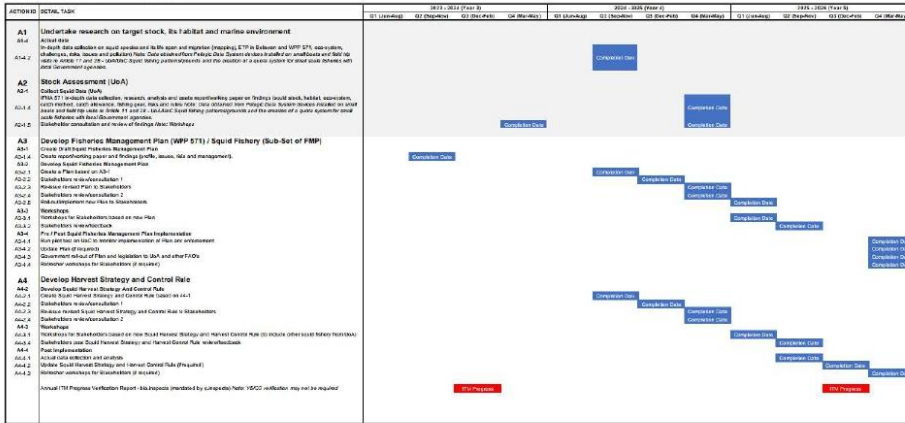
P1 – sustainable fish stocks	P2 – environmental impact
1.1.1. <b>sudah hijau</b>	2.1.1. <b>sudah hijau</b>
1.1.2 <b>N/A</b>	2.2.1. <b>sudah hijau</b>
	2.3.1. <b>sudah hijau</b>
	2.4.1. <b>sudah hijau</b>
	2.5.1 <b>sudah hijau</b>

### Roles and Responsibilities



## Actions (Implementation/Improvements)

Medan Squid Fisheries Timeline (YEARS 3 - 5)



Timeline Reference - November 2021

Lampiran 5. Foto kegiatan pada pertemuan *Harvest Strategy* dan *Harvest Control Rule* di Pantai Timur Sumatera Utara

